

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh OPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja-OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan OPD.

Dinas Ketahanan Pangan Daerah menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Kerja (Renja - OPD) memuat rencana program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas. Dengan begitu baik program maupun kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2024. Di dalamnya termuat rumusan program dan kegiatan beserta rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ Anggaran Daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD). Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah :

1. Memberikan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam tahapan perencanaan anggaran mulai dari KUA / PPAS hingga menjadi RKA – DPA bagi Dinas Ketahanan Pangan Daerah untuk tahun anggaran 2024.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pangan pada Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Capaian Renstra- OPD dan Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Capaian Renstra OPD dan Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2022 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Program/kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 adalah sebanyak 5 (lima) program 14 (empat belas) kegiatan, 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.
- Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 12.652.754.286,00 atau 97,70 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 12.951.187.000,00. Realisasi program/kegiatan untuk memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dalam Renstra OPD;
- Meskipun masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 298.432.714, OPD tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2022, terlebih lagi pada Tahun Anggaran 2022, SKPD memperoleh tambahan personel PNS sebanyak 4 orang.
- Hal khusus yang layak diungkap pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 ini adalah bahwa OPD memperoleh dana cukup besar untuk pengembangan infrastruktur lumbung pangan desa dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2022. Dana tersebut dikelola dalam sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.300.000.000,-
- Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah tahun 2022 untuk masing-masing sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

TABEL II.1
Capaian Kinerja Program Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2022

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP SKPD					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	17.000.000	15.491.750	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	39.500.000	28.036.050	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	22 ASN	22 ASN	3.231.277.000	3.169.863.572	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	29.985.750	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84 stel	84 stel	27.000.000	26.448.000	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	185.000.000	176.184.400	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	28.000.000	27.950.000	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	4 jenis	7.500.000	7.500.000	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	9 jenis	9 jenis	70.000.000	68.558.500	Kinerja Tercapai 100 %

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yang dibiayai	12 bulan	12 bulan	532.000.000	523.075.644	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	4 jenis	4 jenis	60.000.000	59.356.000	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	120.000.000	96.555.455	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah layanan pengelolaan kebersihan, keamanan dan tenaga pengemudi SKPD yang dibiayai	12 bulan	12 bulan	90.000.000	65.963.100	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	6 unit	6 unit	68.000.000	67.990.250	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2 buah	2 buah	195.000.000	193.300.550	Kinerja Tercapai 100 %
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Pangan						
Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Kabupaten / Kota						
<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	2 lokasi	7 lokasi	6.300.000.000	6.252.558.695	Kinerja Tercapai 350 % dr target karena terdapat penambahan anggaran dari DAK Pertanian 2022
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan						
<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	50.000.000	49.152.500	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal</i>	Jumlah Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang disediakan	10 unit bisnis baru	10 unit bisnis baru	115.000.000	105.744.020	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan</i>	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pangan	5 Lokasi	5 Lokasi	61.000.000	59.325.000	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan</i>	Jumlah laporan Data stok / ketersediaan bahan pangan pokok strategis	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	180.000.000	175.983.000	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Pengembangan Kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia</i>	Jumlah gabah yang dibantukan pada kelompok masyarakat	4 LUPM	5 LUPM	100.000.000	93.992.000	Kinerja Tercapai 120 %
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan Kabupaten / Kota						
<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah cadangan pangan pemerintah	26.110 Kg Gabah	70.000 Kg Gabah	1.000.000.000	915.250.000	Kinerja Tercapai 100 %
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						
<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	Jumlah dokumen penetapan target konsumsi pangan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	30.000.000	29.999.750	Kinerja Tercapai 100 %
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman penganekaragaman konsumsi pangan	30 kelompok	30 kelompok	320.000.000	310.176.800	Kinerja Tercapai 100 %
Program Penanganan Kerawanan Pangan						
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						
<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	Jumlah dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	30.000.000	28.677.000	Kinerja Tercapai 100 %

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan yang dilakukan	4 kali koordinasi	4 kali koordinasi	20.000.000	16.697.000	Kinerja Tercapai 100 %
Program Pengawasan Keamanan Pangan						
Kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota						
<i>Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota</i>	Jumlah Sertifikat keamanan PSAT yang diterbitkan	4 buah	8 buah	20.000.000	18.939.500	Kinerja Tercapai 200 %
<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota</i>	Jumlah sarana dan prasarana pengujian PSAT yang disediakan	10 unit	10 unit	40.000.000	40.000.000	Kinerja Tercapai 100 %

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pokok

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2021 - 2026, Visi dan Misi Pembangunan yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi Kabupaten Grobogan periode 2021 - 2026 adalah: " Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya" . Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebanyak 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 dan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi. Sesuai kampanye yang disampaikan oleh Bupati – Wakil Bupati Terpilih, program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM;
- 2) Gerakan Cegah Stunting Dan Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi;
- 3) Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak;
- 4) Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Kemandirian Desa;
- 5) Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Dan Kelestarian Lingkungan;

- 6) Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian;
- 7) Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan;
- 8) Pelayanan publik yang inovatif dan perwujudan smart ASN;
- 9) Pencapaian Grobogan Smart City;
- 10) Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan.

Keseluruhan program tersebut akan didelegasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah melalui program kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan akan diuraikan berikut ini sesuai dengan sintesa kewenangan OPD berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Perbup No. 57 Tahun 2016 tentang Tupoksi OPD yaitu:

1. Kewenangan yang terkait dengan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Permasalahan terkait kewenangan ini adalah masih adanya wilayah yang mengalami kesulitan dalam penyaluran bahan pangan pokok;

2. Kewenangan berikutnya yang terkait dengan pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. Permasalahan terkait kewenangan ini adalah belum terpenuhinya cadangan pangan kabupaten sesuai dengan standar yang ditetapkan provinsi;
3. Kewenangan terkait pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Permasalahan terkait kewenangan ini antara lain:
 - a. Masih belum beragamnya konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan bergizi seimbang, bahan makanan masih didominasi pangan beras;
 - b. Belum masivnya penggunaan produksi olahan pangan lokal dan pemasaran yang masih terbatas;
4. Kewenangan terkait pemetaan dan penanganan kerawanan pangan. Beberapa permasalahan terkait kewenangan ini antara lain:
 - a. Masih kurangnya data terkait kerawanan pangan yang up date dan handal;
 - b. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam penanganan kerawanan pangan;
5. Kewenangan terkait pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar. Permasalahan terkait kewenangan ini antara lain :
 - a. Minimnya sumber daya OPD dalam hal pengawasan keamanan pangan dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk; dan
 - b. Masih lemahnya pemantauan keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan, Dinas Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan mekanisme perencanaan, usulan kegiatan dimulai dari musyawarah di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Demikian juga pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah juga melalui mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian karena Dinas Ketahanan Pangan Daerah bukan OPD yang membidangi kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan umum masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Daerah jarang sekali menerima usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil musrenbang maupun forum musyawarah lainnya. Dengan demikian usulan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah lebih pada mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang baru dibentuk pada Tahun 2021 dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Badan ini dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan dan mempunyai fungsi dalam hal :

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; dan
6. pengembangan sistem informasi pangan.

Oleh karena Badan Pangan Nasional baru dibentuk pada Tahun 2021, acuan arah kebijakan Badan Pangan Nasional RI untuk periode Tahun 2021-2026 masih bersifat asumsi dimana segala kebijakan diasumsikan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Dalam masa sebelumnya, perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan

dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Program yang dirumuskan untuk mencapai misi Badan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024 adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah.

Adapun hasil telaah terhadap dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Dipilihnya indikator Skor PPH, karena meskipun pangan tersedia dalam jumlah yang cukup bahkan berlebih namun bila tidak dapat terjangkau dan dikonsumsi, maka belum dapat memenuhi kebutuhan pangan manusia. Untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif dan berkelanjutan, manusia harus mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen renstra Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk adalah :

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan;
- 2) Peningkatan ketersediaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat;
- 3) Pengembangan cadangan pangan pemerintah;
- 4) Pengembangan lumbung pangan masyarakat;
- 5) Pengembangan fungsi kelembagaan petani;
- 6) Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- 7) Peningkatan akses pangan masyarakat dan pemantauan harga pangan strategis;
- 8) Peningkatan pemasaran dan kewirausahaan petani;
- 9) Peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat;
- 10) Pendidikan kemasyarakatan;
- 11) Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA;
- 12) Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal;
- 13) Pembinaan mutu dan keamanan pangan;
- 14) Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2021 - 2026. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah OPD Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan untuk Tahun 2024 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut :

NO.	TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	89,5
1.1	Meningkatnya ketahanan pangan	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi Terhadap Standar	100
		Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Protein Terhadap Standar	100
		Prosentase Pangan Segar Asal Tumbu-han (PSAT) Aman	100
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerinta-han yang Baik dan PelayananPulik yang Berkualitas di Perangkat Daerah	Indeks reformasi birokrasi	BB (71)
2.1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP PD	BB (70)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	B (77,70)

Adapun Formula/Rumus Perhitungan masing-masing Indikator Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Indikator tujuan :

1. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi : Persentase angka kecukupan energi dibagi bobot setiap golongan bahan pangan;
2. Indeks reformasi birokrasi : Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB.

Indikator sasaran :

1. Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi Terhadap Standar: AKG Energi kabupaten terhadap Standar AKG X 100. Capaian ideal ketika mendekati 100%, lebih dari 100% berarti kekurangan gizi mengarah ke obesitas, kurang dari 100% berarti kekurangan gizi;
2. Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Protein Terhadap Standar : AKG kabupaten terhadap Standar AKG X 100. Capaian ideal ketika mendekati 100%, lebih dari 100% berarti kekurangan gizi mengarah ke obesitas, kurang dari 100% berarti kekurangan gizi;

3. Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman :
Jumlah PSAT aman di bagi jumlah PSAT dikali 100;
4. Nilai SAKIP OPD : Penghitungan bobot nilai masing-masing komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, pencapaian sasaran);
5. Nilai IKM OPD : Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah pada urusan ketahanan pangan.

IV. 1 Rencana Program

Sesuai rencana program dalam Renstra OPD, dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Grobogan, dilaksanakan melalui beberapa program sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Meskipun demikian, sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai program unggulan dalam mendukung pencapaian misi **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”** sesuai nomenklatur yakni Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini selaras dengan program yang dikampanyekan oleh Bupati – Wakil Bupati Terpilih yakni **Gerakan Cegah Stunting dan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi**.

IV. 2 Kegiatan

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,

yang disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, proses perencanaan pembangunan daerah memiliki nuansa baru sejak Tahun Anggaran 2021.

Proses penyusunan anggaran diharuskan menggunakan aplikasi yang disediakan Pemerintah Pusat yakni SIPD yang diharapkan terintegrasi dengan proses penatausahaan keuangan hingga pelaporan. Selain itu, nomenklatur program kegiatan juga dibuat sedemikian ketatnya sehingga tidak dimungkinkan adanya pembuatan program kegiatan baru di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Level pelaksanaan tugas dan fungsi juga bertambah hingga ke level Sub Kegiatan. Satuan Kerja Pemerintah Daerah tinggal menuangkan dinamika sesuai kebutuhan ke dalam level pekerjaan.

Program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif SKPD
Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						target	Rp (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi Terhadap Standar					
		Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Protein Terhadap Standar					
		Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman					
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				6.800.000.000
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						target	Rp (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	buah	6	6.800.000.000
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				608.669.700,00
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	Dokumen	1	33.670.000
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pangan lokal yang dikembangkan	Kelompok	10	115.000.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pangan	Kali	40	200.000.000
			Penyelenggaraan Pelatihan, Inkubasi Bishis dan Pengelolaan UPTD Teknopark Pangan				200.000.000
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Data stok / ketersediaan bahan pangan pokok strategis	Dokumen	1	60.000.000
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Produsen pangan olahan yang masuk inkubasi			99.999.700
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani yang dibina	Produsen	10	100.000.000
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan nabati dan hewani	Ton	150	935.123.200
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				429.999.800
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	30.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah masyarakat yang diberi pemahaman penganekaragaman konsumsi pangan	Orang	200	399.999.800
			Program Penanganan Kerawanan Pangan				65.068.000
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				40.168.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						target	Rp (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kecamatan				
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Jenis	1	40.168.000
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan yang dilakukan	Kali	4	25.000.000
			Program Pengawasan Keamanan Pangan				
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				99.999.800
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan bersama JKPD	Kali	4	20.000.000
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat keamanan PSAT yang diterbitkan	Dokumen	5	20.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian PSAT yang disediakan	Unit	10	59.999.800
	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Rata-rata nilai IKM					
		NILAI SAKIP					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jenis	2	22.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja tersusun	Jenis	2	22.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bulan	12	3.848.190.032
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi	Buah	1	22.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	50	31.194.000
			Bimbingan Teknis				100.800.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						target	Rp (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan SKPD yang didukung konsumsinya	Kegiatan	24	160.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	20.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Jenis	3	10.000.000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	Bulan	12	56.610.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan dinas yang dibiayai	Bulan	12	334.010.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Paket	1	70.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	124.999.700
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan pengelolaan kebersihan, keamanan dan tenaga pengemudi SKPD yang dibiayai	Bulan	12	125.157.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	Unit	12	185.420.300
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	3	209.999.800

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						target	Rp (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terfasilitasinya produsen dan kelompok-kelompok masyarakat dalam akses pangan yang bermutu dan aman	kelompok	20	100.000
			Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terwujudnya sarana prasarana pengembangan sumber pangan alternatif	paket	2	150.000
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pegawai, sarana dan prasarana pendukung layanan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	SKPD	1	1.861.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan layanan biaya listrik, telepon dan air di Kantor SKPD dan bangunan-bangunan di bawah pengelolaan SKPD	Bulan Layanan	12	100.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan layanan biaya penyelenggaraan administrasi keuangan SKPD	Bulan Layanan	12	100.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan layanan penyediaan ATK SKPD	Bulan Layanan	12	70.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bulan layanan biaya cetak penggandaan SKPD	Bulan Layanan	12	30.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bulan layanan biaya langganan surat kabar dan majalah SKPD	Bulan Layanan	12	6.000
			Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	jumlah bulan layanan biaya konsumsi rapat, kegiatan insidental dan jamuan bagi tamu SKPD	Bulan Layanan	12	510.000
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah bulan layanan biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan Layanan	12	750.000
			Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	jumlah bulan layanan biaya perjalanan dinas koordinasi dalam daerah	Bulan Layanan	12	200.000
			Pengelolaan Penatalaksanaan Kepegawaian dan Arsiparis Perkantoran	jumlah bulan layanan penatalaksanaan kepegawaian dan arsiparis	Bulan Layanan	12	20.000
			Pengelola Keamanan, Kebersihan dan Transportasi	bulan layanan pengelolaan keamanan, kebersihan dan pelayanan transportasi SKPD	Bulan Layanan	12	75.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Pekerjaan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
						target	Rp (.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	SKPD	1	450.000
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	paket	3	150.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah bulan layanan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional sebanyak 10 unit	Bulan Layanan	12	100.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah bulan layanan pemeliharaan gedung kantor di bawah pengelolaan SKPD	Bulan Layanan	12	160.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah bulan layanan pemeliharaan fasilitas, peralatan dan perlengkapan kantor SKPD	Bulan Layanan	12	40.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	SKPD	1	40.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi ASN SKPD	Pegawai	25	40.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	SKPD	1	60.000
			Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	Pegawai	25	60.000
				jumlah kegiatan pelatihan singkat bagi pegawai di Kantor SKPD	Kali	3	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	SKPD	1	80.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	jumlah laporan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Laporan	5	80.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja-OPD sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran Renstra OPD dan RPJMD. Renja OPD memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan beserta rencana anggaran dalam satu tahun anggaran. Renja DKPD 2024 dibuat dengan berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan.

Renja DKPD disusun sebagai acuan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta bahan koordinasi dan evaluasi. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja-OPD dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah namun tetap diupayakan bisa mengakomodasi perkembangan lingkungan organisasi.

Purwodadi, Februari 2023

KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



AMIN NUR HATTA, SSos
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19601223 199003 1 001